

Vocational Education Policy 

WHITE PAPER

Vol. 1 Nomor 19 Tahun 2019

ISSN : 2685-5739

7TH
MENUJU
INDONESIA
UNGGUL

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMK MELALUI REVITALISASI BERKELANJUTAN



BETTER POLICIES FOR BETTER VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING



Direktorat Pembinaan SMK
Ditjen Dikdasmen
Kemendikbud

**SMK
BISA-HEBAT**
SIAP KERJA - SANTUN - MANDIRI - KREATIF

Susunan Dewan Redaksi :

VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

ISSN : 2685-5739

Volume 1 No. 19 Tahun 2019

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Direktur PSMK, Dr. M. Bakrun, M.M

Ketua Redaksi

Kasubdit Program dan Evaluasi, Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.

Redaksi Pelaksana

Chrismi Widjajanti

Abdul Haris

Farid Prasetyo Adi

Muhammad Abdul Majid

Ahmad Rofiuddin Syafaa

Editor

Gustriza Erda, S.Si, M.Si.

Fotografi, Desain & Artistik

Ari

Muhammad Raidinoor

Dzorif Fadlan

Online Redaksi

Muhammad Herdyka

Mitra Redaksi (*Editorial Advisory Board*)

1. Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Si (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang)

2. Prof. Dr. Suwarna, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta)

3. Hamid Muhammad, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta)

4. Dr. Ima Ismara, M.Pd., M.Kes. (Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta)

5. Irmawaty, SE., M.Si (Universitas Terbuka)

Alamat Redaksi dan Distribusi :

Redaksi VOCATIONAL EDUCATION POLICY, WHITE PAPER

Gedung E Lantai 12-13 Kompleks Kemendikbud

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telp. (021) – 5725477 (Hunting) 5725471-74 Fax. (021) – 5725049

Laman : psmk.kemdikbud.go.id, Surel : program.psmk@kemdikbud.go.id



PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMK MELALUI REVITALISASI BERKELANJUTAN

Arie Wibowo Khurniawan¹, Gustriza Erda²

Abstrak. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan yang baik diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di SMK adalah dengan melakukan revitalisasi bersandar pada konsep keberlanjutan (*sustainability*). Kajian kebijakan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi SMK saat ini serta memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan revitalisasi berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian diperoleh bahwa pondasi dasar dalam revitalisasi SMK adalah karakter kepemimpinan yang dimiliki kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin juga harus punya tujuan, visi dan misi yang jelas sehingga dapat membawa sekolah menjadi berkembang dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu sekolah. Sementara, faktor pengungkit dari revitalisasi berkelanjutan adalah guru. Semakin baik kualitas guru yang ada di sekolah, maka semakin besar pula peluang menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas

Kata Kunci: guru, kepala sekolah, mutu pendidikan, revitalisasi berkelanjutan, SMK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 31 UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya dan terciptanya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila seperti yang tertera pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh (Mulyasa, 2005). Pendidikan yang baik diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Muhibin, 2005). Peningkatan pendidikan dimulai dari membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan dalam manajemen pendidikan, maka revitalisasi menjadi hal pokok yang mesti digarap dan

¹ Kepala Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Dikdasmen, Kemdikbud

² Staf Subdit Program dan Evaluasi

dituntaskan. Namun, revitalisasi jangan hanya dikerangkai sebagai belanja alat baru namun juga perlu dimaknai sebagai paradigma baru dalam memandang masa depan pendidikan. Model revitalisasi pendidikan ke depan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan sarana dan sarana sekolah, melainkan dengan memaksimalkan sumber mutu yang berada di sekolah dan harus bersandar pada konsep keberlanjutan (sustainability). Keberlanjutan penting sebagai upaya untuk mengoptimalkan semua potensi sekolah demi peningkatan kualitas pendidikan.

Kajian ini mengupas tentang strategi peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui revitalisasi berkelanjutan. Diharapkan informasi yang dihasilkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pihak yang terkait dalam proses pembuatan rekomendasi dan perumusan kebijakan dalam meningkatkan mutu Pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran dan informasi terkait dengan kondisi SMK.
2. Menganalisis dan mengevaluasi pendidikan di SMK.
3. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan rekomendasi dan perumusan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dan tak langsung, antara lain:

1. Sebagai sumber informasi dan bahan kajian yang terkait dengan pendidikan SMK di Indonesia.
2. Sebagai bahan rujukan dan bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam meningkatkan mutu pendidikan.
3. Sebagai landasan untuk kajian kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

METODE

Data

Kajian kebijakan ini menggunakan data yang tercantum dalam rapor peta mutu pendidikan (PMP) dan neraca pendidikan dasar (NPD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, kajian kebijakan ini juga mengambil referensi dari dokumen-dokumen yang terkait seperti buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal yang membahas tentang peningkatan mutu pendidikan SMK melalui revitalisasi berkelanjutan

Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menghimpun informasi yang relevan terhadap topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Pencarian data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang mendukung dalam proses penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Revitalisasi SMK

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan, organisasi atau manajemen lainnya yang dulunya pernah vital

hidup namun setelahnya mengalami kemunduran dan degradasi. Proses revitalisasi mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi, baik dari segi bangunan maupun manajemen. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang.

Revitalisasi SMK tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Menindaklanjuti Inpres tersebut, revitalisasi SMK dilakukan dengan tujuan yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan *Link and Match* sekolah dengan Dunia Usaha/Industri.
2. Mengubah paradigma dari *push* menjadi *pull*. Artinya paradigma SMK yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri.
3. Mengubah pembelajaran dari *supply driven* ke *demand driven*.
4. Menyiapkan lulusan SMK yang dapat beradaptasi terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
5. Mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan DUDI baik dari aspek teknologi, administratif, maupun kompetensi.

Dalam perwujudan revitalisasi, dibentuk 10 langkah revitalisasi SMK dengan tujuan agar sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan

tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif (Kemendikbud, 2017). Diharapkan keberhasilan revitalisasi SMK ini juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta dapat mengurangi permasalahan pengangguran usia produktif. Sepuluh langkah revitalisasi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Revitalisasi sumber daya manusia
2. Membangun SAS berbasis SIM
3. *Link and match* dengan industri
4. Kurikulum berbasis industri
5. *Teaching factory*
6. Penggunaan Media Video Tutorial dan Portofolio Berbasis Video e-Report Skill
7. Uji Sertifikasi Profesi
8. Pemenuhan sarana dan prasarana
9. Mengembangkan Kearifan Lokal
10. Peran SMK Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

Mutu SMK

Mutu SMK dinilai berdasarkan pemenuhan SMK terhadap 8 standar nasional pendidikan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (SNP). Standar nasional pendidikan adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

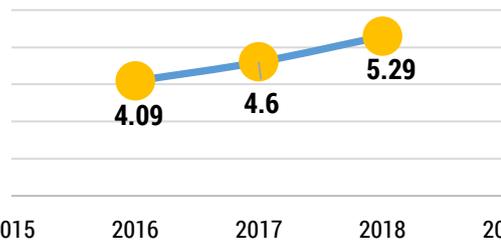
SNP berfungsi sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. Tujuan utama dari SNP adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Terdapat 8 standar nasional pendidikan, yaitu:

1. Standar isi
2. Standar kompetensi lulusan (SKL)
3. Standar proses pendidikan
4. Standar sarana dan prasarana
5. Standar pengelolaan
6. Standar pembiayaan pendidikan
7. Standar penilaian pendidikan
8. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

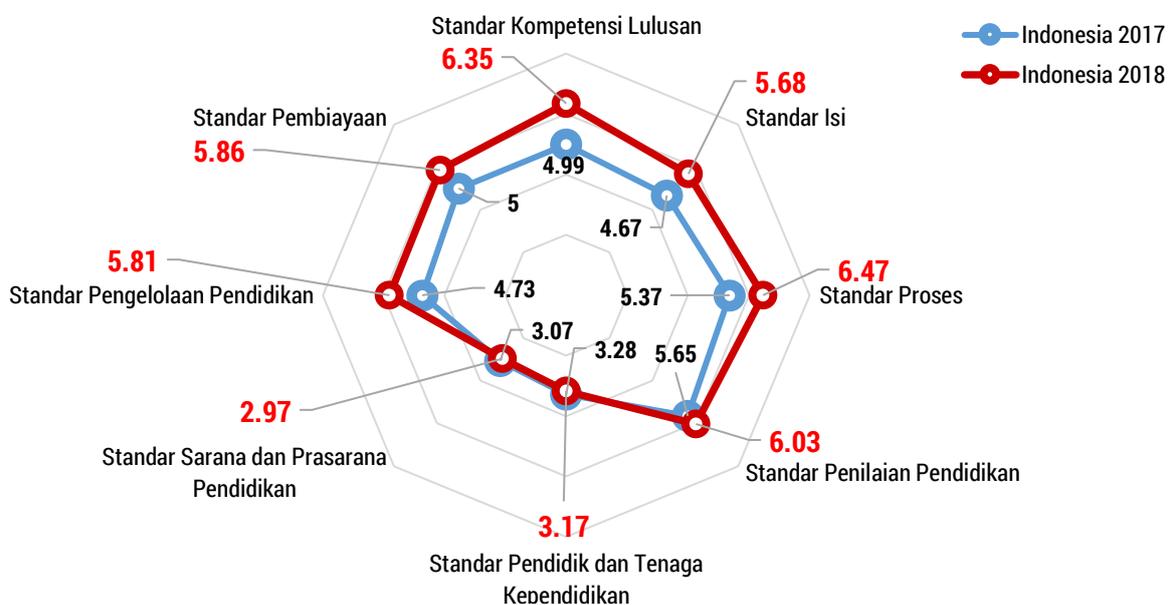
Pemenuhan standar nasional pendidikan yang telah dicapai sekolah tercantum dalam rapor mutu pendidikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa terdapat peningkatan pemenuhan SNP untuk tiap tahunnya. Pencapaian standar untuk SMK untuk tahun 2016 dan tahun 2017 berada di kategori III yaitu masing-masing 4.09/7 dan 4.6/7. Artinya pemenuhan sekolah berbasis pada 8 standar nasional pendidikan dapat dikatakan sudah cukup baik. Di tahun selanjutnya, pencapaian standar untuk SMK masuk dalam kategori IV yang menandakan bahwa sekolah telah menuju SNP 4 (mencapai kategori yang baik). Namun masih perlu ditingkatkan lagi,

terutama dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana.



Sumber: Peta Mutu Pendidikan 2018 (diolah)
Gambar 1. Rapor Mutu SMK Tahun 2016-2018

Informasi terkait pencapaian setiap standar dengan rentang nilai antara 0 hingga 7 secara lengkap terangkum dalam Gambar 2. Standar yang hampir memenuhi 8 standar nasional pendidikan adalah standar proses. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMK telah dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi sesuai dengan yang telah tertuang dalam. Selain itu, standar kompetensi lulusan juga menunjukkan capaian yang baik. SMK yang tersebar di Indonesia dinilai telah memiliki lulusan yang hampir memenuhi standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan SNP.



Sumber: Peta Mutu Pendidikan 2018 (diolah)
Gambar 2. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tahun 2017 dan 2018

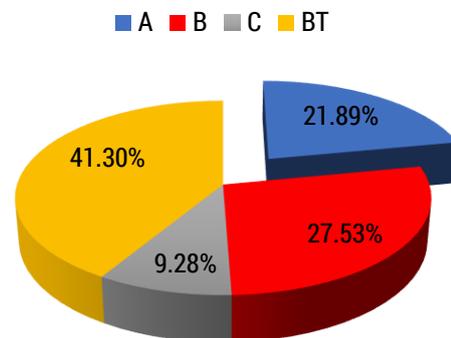
Di lain sisi, perlu adanya perhatian khusus terkait dengan standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMK. Kedua standar tersebut memiliki capaian yang rendah dan masuk dalam kategori yang kurang baik. Masih banyak SMK yang belum dilengkapi dengan sarana pendidikan (media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, perabot, dan perlengkapan lainnya) serta prasarana pendidikan (lahan, ruang kelas, ruang pendidik, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan prasarana pendukung lainnya) yang sesuai dan memadai. SMK juga masih membutuhkan tenaga pendidik/guru, terutama guru kejuruan, dalam jumlah cukup besar. Jumlah Guru yang berperan sebagai agen pembelajaran, yang sehat rohani dan jasmani, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional masih jauh dari cukup.

Akreditasi Sekolah

Mutu sekolah juga dapat tercermin dalam akreditasi yang didapatkan oleh sekolah. Akreditasi adalah sebuah kegiatan pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga Pendidikan. Akreditasi dilandaskan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS)/ Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M). Hasil akreditasi sekolah dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Dengan adanya akreditasi, terdapat jaminan kepada publik bahwa sekolah menyediakan layanan pendidikan yang

memenuhi standar akreditasi nasional serta memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional.

Akreditasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: A, B, dan C. Sekolah akan mendapatkan akreditasi A apabila memiliki nilai antara 86-100 (Amat Baik); akreditasi B apabila memiliki nilai antara 71-85 (Baik); dan akreditasi C apabila memiliki nilai antara 56-70 (Cukup). Apabila sekolah memiliki nilai yang kurang dari 56 maka sekolah tersebut tidak layak untuk mendapatkan pengakuan "terakreditasi" dikategorikan sebagai sekolah yang belum terakreditasi (BT).



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2018 (diolah)

Gambar 3. Persentase Akreditasi SMK

Berdasarkan persentase nasional seperti yang tertera pada Gambar 3, hasil akreditasi tahun 2018 menunjukkan bahwa SMK yang tersebar di Indonesia berada pada peringkat baik (Akreditasi B) dengan persentase sebesar 27.53%. SMK dengan penilaian sangat baik (akreditasi A) hanya sekitar 21.89% atau kurang sekitar 6% dari persentase SMK dengan akreditasi B. Ironisnya, masih banyak sekolah-sekolah yang tersebar di Indonesia yang belum terakreditasi. Persentase nasional menunjukkan bahwa terdapat 41.30% SMK yang masih belum mendapatkan pengakuan. Artinya hampir setengah dari sekolah yang tersebar di tiap provinsi di Indonesia belum terakreditasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Danim (2007) mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan faktor yang dominan, yaitu:

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. (Danim, 2002). Meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan, kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah.

Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam Tata kelola sekolah menegakkan aturan, etika guru, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan memberikan sanksi, pedoman, serta prosedur dalam pelayanan. Pelayanan berupa administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio. harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Kepala sekolah harus mampu menunjukkan kepemimpinan efektif yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam sekolah, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepala sekolah juga hendaknya mampu memprediksi masa depan, merumuskan

dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam sekolah.

Dan yang paling penting, kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Kepala sekolah yang baik ialah kepala sekolah yang dapat membawa perubahan positif dan menggerakkan semua unsur sekolah untuk ke arah yang lebih baik.

2. Guru

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, kualifikasi akademik Guru SMK / MAK Guru pada SMA dan MAK harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) pada program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Tabel 1. Kualifikasi Guru SMK tahun 2018

Provinsi	Kualif. Guru (SMK)		Provinsi	Kualif. Guru (SMK)	
	≥D4/S1	<D4/S1		≥D4/S1	<D4/S1
D.K.I. Jakarta	94.7%	5.3%	Sulawesi Tengah	94.1%	5.9%
Jawa Barat	92.0%	8.0%	Sulawesi Selatan	95.9%	4.1%
Jawa Tengah	95.5%	4.5%	Sulawesi Tenggara	95.3%	4.7%
D.I. Yogyakarta	96.1%	3.9%	Maluku	90.4%	9.6%

Provinsi	Kualif. Guru (SMK)		Provinsi	Kualif. Guru (SMK)	
	≥D4/S1	<D4/S1		≥D4/S1	<D4/S1
Jawa Timur	95.5%	4.5%	Bali	94.7%	5.3%
Aceh	96.1%	3.9%	NTB	95.9%	4.1%
Sumatera Utara	85.1%	14.9%	NTT	92.5%	7.5%
Sumatera Barat	97.0%	3.0%	Papua	90.2%	9.8%
Riau	93.8%	6.2%	Bengkulu	93.3%	6.7%
Jambi	94.2%	5.8%	Maluku Utara	90.2%	9.8%
Sumatera Selatan	93.2%	6.8%	Banten	92.9%	7.1%
Lampung	90.0%	10.0%	Bangka Belitung	93.5%	6.5%
Kalimantan Barat	90.9%	9.1%	Gorontalo	95.0%	5.0%
Kalimantan Tengah	94.7%	5.3%	Kepulauan Riau	93.3%	6.7%
Kalimantan Selatan	94.7%	5.3%	Papua Barat	93.6%	6.4%
Kalimantan Timur	95.1%	4.9%	Sulawesi Barat	91.1%	8.9%
Sulawesi Utara	94.3%	5.7%	Kalimantan Utara	97.1%	2.9%

Berdasarkan kualifikasi guru SMK untuk tiap provinsi pada Tabel 1, dapat dikatakan bahwa secara umum guru SMK yang tersedia di Indonesia telah memenuhi kualifikasi yang baik. 85.1% hingga 97.1% guru telah memiliki kualifikasi >D4/S1 dengan persentase kualifikasi tertinggi berada di Kalimantan Utara dan Sumatera Barat (lebih dari 97%) sementara persentase kualifikasi terendah berada di Sumatera Utara sebesar 85.1%. Kualitas guru yang telah baik ini hendaknya diikuti dengan kompetensi tenaga pendidikan yang juga mumpuni. Kompetensi guru berupa kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang telah dijelaskan pada Permendiknas No.16 Tahun 2007 seharusnya telah dimiliki oleh setiap pengajar yang ada.

Pelibatan guru dalam mengembangkan diri harus dilakukan secara maksimal. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan yang diikuti dapat diterapkan disekolah.

3. Siswa;

Sekolah hendaknya menggunakan pendekatan "anak sebagai pusat" dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Agar konsep 'anak sebagai pusat' dapat terlaksana dengan baik, tentu perlu diperhatikan rasio antara guru dan siswa yang ada di kelas. Apabila siswa yang terdapat dalam kelas terlalu banyak, guru agaknya akan mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada anak.

Rasio guru-siswa merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan. Rasio guru-siswa digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rumus untuk menghitung rasio guru-siswa SMK adalah sebagai berikut:

$$\text{rasio guru - siswa} = \frac{\text{jumlah guru}}{\text{jumlah siswa}}$$

Jumlah tenaga pendidik SMK di Indonesia berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar 292.118 pengajar dengan total peserta didik sebesar 5.029.993 siswa/i. Sehingga rasio guru-siswa SMK adalah sebesar 1: 17. Artinya seorang guru rata-rata mengajar sebanyak 17 siswa/i SMK dalam suatu kelas. Secara kuantitas, dapat dikatakan bahwa tenaga pengajar SMK sudah memiliki rasio perbandingan yang cukup baik. Namun, rasio guru-siswa tersebut masih belum mencapai rasio ideal, karena berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17, rasio ideal antara guru dan siswa SMK adalah 1:15. Tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Apabila dilihat berdasarkan perbandingan guru dan siswa SMK di tiap daerah seperti tertera pada Tabel 2, masih terdapat banyak provinsi yang memiliki perbandingan rasio guru-siswa yang lebih dari rasio nasional, seperti pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Bali, Banten dan Kepulauan Bangka Belitung. Jika melihat secara provinsi, jumlah tenaga pengajar sudah

mencukupi dengan rentang perbandingan satu guru mengajar 9 siswa hingga 22 siswa. Provinsi yang memiliki rasio perbandingan jumlah guru dan siswa tertinggi di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dimana perbandingannya sebesar 1:22. Sementara. Provinsi yang memiliki rasio perbandingan jumlah guru dan siswa terendah di Indonesia adalah Provinsi Aceh, dimana 1 guru mengajar sebanyak 9 siswa/i.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Salah satu upaya nyata dalam peningkatan pendidikan adalah dengan menyiapkan kelas ideal untuk seluruh tingkat pendidikan. Tersedianya kelas ideal akan memberikan efek positif terhadap pelaksanaan kurikulum. Tanpa kelas ideal, akan sulit untuk menerapkan kurikulum secara tepat dan maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah guru agar para siswa dapat menyerap pelajaran dan ilmu yang diberikan sehingga mutu pengajaran semakin tinggi dan kurikulum yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai harapan.

Tabel 2. Perbandingan guru dan siswa SMK tahun 2018

Provinsi	Rasio Guru:Siswa	Provinsi	Rasio Guru:Siswa
D.K.I. Jakarta	1:22	Sulawesi Tengah	1:13
Jawa Barat	1:21	Sulawesi Selatan	1:14
Jawa Tengah	1:19	Sulawesi Tenggara	1:11
D.I. Yogyakarta	1:14	Maluku	1:11
Jawa Timur	1:18	Bali	1:19
Aceh	1:9	NTB	1:11
Sumatera Utara	1:17	NTT	1:14
Sumatera Barat	1:12	Papua	1:12
Riau	1:14	Bengkulu	1:12
Jambi	1:13	Maluku Utara	1:11
Sumatera Selatan	1:17	Banten	1:22
Lampung	1:15	Bangka Belitung	1:18

Provinsi	Rasio Guru:Siswa	Provinsi	Rasio Guru:Siswa
Kalimantan Barat	1:20	Gorontalo	1:12
Kalimantan Tengah	1:14	Kepulauan Riau	1:15
Kalimantan Selatan	1:16	Papua Barat	1:13
Kalimantan Timur	1:17	Sulawesi Barat	1:13
Sulawesi Utara	1:13	Kalimantan Utara	1:14

4. Kurikulum;

Kurikulum SMK di Indonesia sebagian besar masih mengacu pada teori-teori sehingga pada tahun pertama kurikulum SMK di Indonesia tidak jauh berbeda dengan SMA. Jika dilihat pada tahun pertama 100% kurikulum SMK masih berbasis teori dengan mata pelajaran wajib seperti Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, Seni Budaya dan lain lain. Hal tersebut tentu membuat siswa SMK tidak 100% mempelajari kejuruan yang mereka pilih.

Hal tersebut sangat berbeda dengan kurikulum di Jerman dimana tahun pertama kurikulum sudah melakukan pelajaran praktik dengan bobot sudah mencapai 100%. semua pelajaran berbasis teori dianggap sudah tuntas di jenjang sebelumnya (SMP) sehingga pembelajaran di SMK adalah 100% kompetensi kejuruan sejak di tingkat 1 hingga akhir (~2,5-3,5 tahun).

Pada tahun kedua, SMK di Indonesia sudah mengajarkan praktik dengan komposisi mencapai 38% dan 62% masih ajaran teori, sedangkan di Jerman pada tahun kedua sudah mengajarkan paket keterampilan lanjutan dengan bobot praktik masih mencapai 100%. Pada tahun terakhir SMK di Indonesia sudah 50% mengajarkan praktek sedangkan 50% lainnya masih mengajarkan teori, sedangkan tahun

terakhir SMK di Jerman yaitu tahun ke 3 dan ke 4 sudah mengajarkan paket ketrampilan ke 3 dan ke 4.

Perbandingan kurikulum SMK Indonesia dan Jerman dapat menggambarkan daya saing lulusan SMK kedua negara tersebut. Lulusan SMK di Indonesia hanya memiliki 1 paket keterampilan sedangkan lulusan SMK Jerman memiliki 4 paket ketrampilan. Dengan demikian secara langsung daya saing SMK di Indonesia bisa dikatakan hanya ¼ dari lulusan SMK di Jerman.

Komparasi antara model komposisi kurikulum di Indonesia dengan komposisi kurikulum di Jerman pada kompetensi keahlian listrik di jelaskan oleh Tabel 3 dan Tabel 4. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengajaran kurikulum di SMK, mata pelajaran Kurikulum terkait dengan kejuruan sangatlah tidak proporsional, padahal di sisi lain esensi dari SMK adalah kejuruan itu sendiri. Perlu adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal serta sesuai dengan kebutuhan dari Dunia Industri. Hal ini penting untuk dapat menyediakan tenaga kerja yang sesuai pasar, bukan malah memasarkan tenaga kerja.

Tabel 3. Komposisi Kurikulum SMK di Jerman (Kompetensi keahlian listrik)

No	Learning Field (Kompetensi Kejuruan)	Bobot tahun ke – (%)			
		1	2	3	4
1	Analyse electrical system and check function	25			

No	Learning Field (Kompetensi Kejuruan)	Bobot tahun ke – (%)			
		1	2	3	4
2	<i>Plan and execute electrical installations</i>	25			
3	<i>Analyse and adjust control system</i>	25			
4	<i>Make information technology systems available for use</i>	25			
5	<i>Ensure electrical energy supply and the safety of operating equipment</i>		29		
6	<i>Analyse and check equipment and sub-assemblies in plants</i>		21		
7	<i>Programme and realise control systems for plants</i>		29		
8	<i>Select and integrate drive systems</i>		21		
9	<i>Execute technical building services plants and put these into operation</i>			28	
10	<i>Set up and maintain energi plants</i>			36	
11	<i>Put into operation and maintain automated plants</i>			36	
12	<i>Plan and realise electrical plants</i>				57
13	<i>Maintain and adjust electrical plants</i>				43
Total		100	100	100	100

Sumber : <https://www.bibb.de/en/> (2017)

Tabel 4. Komposisi Kurikulum SMK di Indonesia (Kompetensi keahlian listrik)

No	Learning Field (Kompetensi Kejuruan)	Bobot tahun ke – (%)		
		1	2	3
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	6	6	6
2	PPKN	4	4	4
3	Bahasa Indonesia	9	9	9
4	Matematika	9	9	9
5	Sejarah Indonesia	4	4	4
6	Bahasa Inggris	4	4	4
7	Seni Budaya	4	4	4
8	Prakarya dan Kewirausahaan	4	4	4
9	Penjaskes	6	6	6
10	Fisika	4	4	0
11	Kimia	4	4	0
12	Gambar Teknik	4	4	0
13	Teknik kerja bengkel	17	0	0
14	Dasar-dasar kelistrikan	21	0	0
15	Paket Keahlian 1	0	38	50
Total		100	100	100

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pondasi dasar revitalisasi SMK adalah *leadership*. Kepala sekolah sebagai *leader* dalam sekolah bukan hanya berperan sebagai seorang pengelola atau manajer yang baik namun berperan sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan semua anggota civitas akademika yang tergabung di dalamnya menjadi lebih baik. Kepala sekolah harus bisa memimpin dan memiliki strategi pengembangan sekolah. Kepala sekolah harus sadar bahwa bahwa adil bukan harus merata, artinya kepala sekolah tidak disarankan untuk melakukan pengembangan kompetensi keahlian yang ada di sekolahnya langsung secara merata, namun secara bertahap. Kompetensi yang diunggulkan di sekolah haruslah dikembangkan terlebih dahulu secara maksimal, apabila telah berhasil, maka baru mengembangkan kompetensi keahlian lainnya.

Kepala sekolah sebagai pemimpin juga harus punya tujuan, visi dan misi yang jelas sehingga dapat membawa sekolah menjadi berkembang dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu sekolah. Kepala sekolah harus bisa menggambarkan masa depan yang lebih baik yang ingin dicapai dengan membuat visi yang tepat dan misi yang jelas. Visi yang dibuat haruslah bersifat jangka panjang dan logis, menarik, mudah dikomunikasikan, memiliki waktu yang spesifik dan punya rincian yang jelas bagaimana cara untuk mewujudkannya.

Dilain sisi, faktor pengungkit atau kunci utama dalam melaksanakan revitalisasi berlanjutan di SMK adalah peningkatan kualitas guru. Semakin baik kualitas guru yang ada di sekolah, maka semakin baik pula kualitas siswa yang ada di sekolah tersebut. Hal ini dikarenakan guru sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran di kelas.

Guru yang tersedia di sekolah haruslah profesional, inovatif, dan kreatif agar dapat mencetak lulusan yang juga berkualitas. Saat ini, sudah banyak guru yang telah menguasai strategi dan model pembelajaran, namun kenyataan dilapangan, masih banyak dijumpai guru yang dalam mengajar masih terkesan hanya melaksanakan kewajiban, banyak ceramah (*telling method*) dan kurang membantu pengembangan aktivitas siswa. Realitas tersebut dapat ditemukan hampir disemua sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Apabila hal tersebut dibiarkan maka dapat mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah yang pada gilirannya akan ditemukan sekolah-sekolah yang mandul dan tidak diminati oleh siswa dan akhirnya ditutup.

Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kualitas guru dalam revitalisasi berkelanjutan di SMK, guru harus mempunyai syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar efektif dikelas, saling bekerja sama dalam belajar sehingga tercipta suasana yang menyenangkan dan saling menghargai (demokratis). Beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan guru sebagai kunci utama dalam revitalisasi berkelanjutan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar, variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup. Metode pelajaran yang diberikan oleh guru hendaknya disesuaikan dengan kondisi anak saat ini. Jika guru menerapkan metode yang sama dengan yang diterapkan paada zaman dulu, tentu tidak efektif dan akan terasa membosankan siswa.
2. Selain sebagai pengajar, guru perlu terus menumbuhkan motivasi pada siswa. Motivasi yang diberikan sangat berperan pada

kemajuan dan perkembangan siswa. Bila guru memberikan motivasi yang tepat dan mengenai sasaran, maka akan berdampak positif terhadap siswa dimana minat siswa terhadap pelajaran akan meningkatkan dan siswa akan belajar lebih tekun, giat dan lebih bersemangat. Jika guru memiliki kompetensi untuk memotivasi tersebut, tidak mustahil peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dapat terwujud.

3. Guru juga hendaknya dibekali lebih lanjut dengan keilmuan yang sedang berkembang dan yang terbaru (*up to date*). Masih banyak guru SMK dengan minim pengalaman di dunia industri serta tidak terlalu paham tentang pengaplikasian keahlian yang dimiliki dalam dunia industri. Oleh karena itu, sekolah perlu mengundang pelatih yang terbaik di bidangnya untuk memberikan pengalaman serta penambahan ilmu kompetensi kepada guru. Jika perlu, sekolah mengirim guru untuk magang di industri ataupun ke luar negeri untuk mendapatkan keterampilan baru. Sederhananya, jika guru yang mendapat pengalaman dan pelatihan dari Du/Di, maka

seluruh siswa akan turut merasakannya juga karena tentu guru akan memberikan ilmu yang diperolehnya kepada siswa.

4. Kepala sekolah juga berperan dalam meningkatkan kualitas guru. Dengan demikian kepala sekolah harus membuat strategi peningkatan kualitas mutu, tidak hanya semata-mata ditekankan kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar, namun juga peningkatan komitmen dan motivasi guru. Dengan meningkatnya kemampuan dan motivasi kerja guru, maka kualitas akademik pun semakin meningkat, yang pada akhirnya juga meningkatkan kualitas pendidikan.

Perubahan paradigma tersebut tentu harus dilakukan secara bersama-sama antara kepala sekolah, guru dan karyawan serta semua unsur pendidikan. Pimpinan, guru dan karyawan harus menjadi satu tim yang utuh (*teamwork*) yang saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang ada sehingga tujuan serta visi dan misi sekolah akan tercapai dengan baik dan peningkatan kualitas sekolah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Danim S. 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara

Danim S. 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

[Kemendikbud] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (10 Langkah Revitalisasi SMK)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Dikdasmen

Mulyasa E. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Dalam menyukkseskan MBS Dan KBK*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya

Muhibin Z. 2005. Strategi peningkatan mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Sosial Humaniora*.5:2

Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.